

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) adalah perjanjian bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan yang dilakukan untuk mendorong peningkatan hubungan perdagangan dan ekonomi. Keputusan membuat kerja sama tersebut dibuat pada tahun 2012. Berdasarkan pada susunan perjanjian dagang Indonesia dan Korea Selatan, kedua negara akan menjalankan peningkatan kerja sama ekonomi pada 3 sektor utama yaitu akses pasar dagang barang dan jasa, peningkatan upaya pengadaan fasilitas perdagangan dan investasi serta kerja sama dan *capacity building*.

*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) merupakan bentuk dari kerja sama dagang bilateral. Kerja sama dagang tersebut dilakukan antara dua negara untuk memenuhi kepentingan masing-masing negara. Bagi Korea Selatan, negara tersebut adalah salah satu negara industrialisasi yang juga termasuk dalam *newly industrializing countries* (NICs) dan sejak tahun 1960an mulai memperoleh kekuatan ekonomi negara dan pembangunannya (Beeson, 2014). Kebangkitan ekonomi Korea Selatan dimulai dari industri bahan kimia dan secara berkelanjutan perekonomian di negara tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan. Adanya kemajuan ekonomi yang terjadi di negara tersebut tidak lepas dari ambisi ekonomi yang dimiliki oleh Korea Selatan untuk membangun negaranya. Sebagai negara dengan salah satu fokus utama dalam bidang industrial, Korea Selatan

membutuhkan jangkauan yang luas dan menjanjikan untuk memperbanyak pasar bagi produk-produknya. Korea Selatan melihat Indonesia adalah salah satu negara tujuan yang menjanjikan bagi pemasaran produknya.

Menilik kondisi Indonesia, terdapat pasar yang cukup baik bagi produk luar karena Indonesia berada di jalur penting perdagangan dunia dan tingkat konsumsi pasar di Indonesia cenderung tinggi. Data menunjukkan pada kuartal ketiga tahun 2020 Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di dunia dengan tingkat konsumsi rumah tangga mencapai 160 Miliar US dollar (The Global Economy, 2020). Pasar Indonesia yang menunjukkan adanya arus konsumsi tinggi merupakan aspek penting bukan hanya bagi negara yang memasok produk tapi juga bagi Indonesia sendiri karena bisa mendorong adanya pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kondisi lain, Indonesia juga melakukan penguatan ekonomi dengan melakukan perdagangan dan ekspor barang dan jasa ke negara lain untuk memperoleh pemasukan dan meningkatkan devisa negara.

Perjanjian antara kedua negara pada lingkup perjanjian dagang dilakukan karena perjanjian pada tingkat bilateral adalah bentuk utama dari diplomasi ekonomi yang berisi tentang kesepakatan antara negara, baik yang formal maupun informal (Bayne & Woolcock, 2017). Indonesia dan Korea Selatan sebagai negara yang memiliki kesempatan untuk meningkatkan dan memanfaatkan kerja sama secara bertahap melakukan penguatan kerja sama dalam bidang ekonomi. Salah satu perjanjian yang memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara adalah Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). Pada tahun 2012, telah dilakukan dua kali perundingan IK-CEPA yaitu pada 12 Juli 2012 lalu 10-11 Desember 2012 dengan menghasilkan *Terms of Reference* (TOR) IK-CEPA yang bertumpu pada kesepakatan bersama (SWAOnline, 2013). Selanjutnya pada perundingan ke-6 yang dilaksanakan 4-8 November 2013 di Bali didapatkan hasil terkait *pending issues* pada aspek *Standards, Technical Regulation and Conformity Assessment Procedures* (STRACAP) (Badan Standardisasi Nasional, 2013). Putaran ke-7 selanjutnya dilaksanakan pada 21-28 Februari 2014 yang membahas tentang *pending issues* secara lebih detail dan juga menjadi tahapan terakhir perundingan

sebelum akhirnya mengalami kevakuman (Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2018).

Perundingan perjanjian kerja sama dagang antara Indonesia dan Korea Selatan IK–CEPA sempat berjalan selama dua tahun hingga pada tahun 2014 dilakukan perundingan terakhir sebelum diberhentikan sementara sampai tahun 2018 karena belum menemui kesepakatan bersama. Disebutkan oleh Direktur Jenderal Perundingan Luar Negeri Kemendag, Iman Pambagyo, salah satu penyebab terhentinya perundingan IK – CEPA adalah adanya pergantian kepala negara di Indonesia. Indonesia melaksanakan pemilihan presiden pada tahun 2014 yang menyebabkan kondisi politik sedang tidak stabil sehingga memutuskan untuk menghentikan perundingan agar tidak memberikan ketidakpastian untuk pihak Korea Selatan (DP, 2019). Selain kondisi politik Indonesia yang sedang fokus pada pemilihan presiden, terdapat penyebab lain mengapa perundingan IK –CEPA sempat terhenti yaitu pada kesepakatan terkait kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional kedua negara yang belum mencapai kesepakatan bersama. Isu utama lain yang belum dicapai adalah pada keseimbangan pemberian konsesi bidang perdagangan barang, investasi dan kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2019).

Namun, setelah mengalami masa jeda pada proses perundingan selama 4 tahun, Indonesia dan Korea Selatan akhirnya melanjutkan kembali perundingan IK –CEPA. Pada tahun 2018 melalui *East Asia Summit*, Indonesia dan Korea mulai merundingkan kembali perjanjian IK–CEPA dengan mengedepankan prinsip keuntungan bersama (Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2018). Adanya keinginan kedua negara untuk melanjutkan perundingan kerja sama dilakukan dengan mengadakan kelanjutan reaktivasi perundingan pada 19 Februari 2019 yang diikuti perundingan kedelapan pada 30 April-2 Mei 2019 di Seoul, Korea Selatan (Anggraeni, 2019). Selanjutnya dilaksanakan lagi perundingan ke-9 pada 28-30 Agustus di Jeju, Korea Selatan dan perundingan ke-10 pada 7-

10 Oktober 2019 sebagai perundingan terakhir yang ditandai dengan penandatanganan penyelesaian substansial IK –CEPA.

Setelah melalui rangkaian panjang proses negosiasi dan sempat terhentinya perundingan selama empat tahun, perjanjian dagang antara Indonesia dan Korea Selatan akhirnya resmi ditandatangani pada Desember 2020. Kedua negara telah mencapai kesepakatan dalam perundingan yang dilakukan melalui proses negosiasi. Negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia berhasil mencapai kesepakatan bersama dengan Korea Selatan untuk melanjutkan perjanjian dagang IK –CEPA. Adanya penundaan pada proses perundingan yang pernah terjadi selama empat tahun akhirnya mencapai kesepakatan bersama karena Indonesia berhasil melakukan negosiasi dengan Korea Selatan. Faktor-faktor yang menyebabkan negosiasi Indonesia dengan Korea Selatan bisa mencapai kesepakatan dalam perundingan IK –CEPA akan dibahas dalam tulisan ini secara lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, muncul rumusan masalah: “Apa faktor-faktor yang mendorong negosiasi Indonesia dengan Korea Selatan sehingga perjanjian IK-CEPA disepakati?”

## **C. Kerangka Teoritik**

### **1. Konsep Kepentingan Nasional**

Pada Ilmu Hubungan Internasional salah satu aktor memiliki peran penting pada proses jalannya hubungan dengan pihak lain adalah negara. Negara sebagai salah satu pelaku utama pada Ilmu Hubungan Internasional menjalin hubungan dengan aktor lain untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan negaranya dalam berbagai aspek. Adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan akan sesuatu adalah kepentingan nasional yang tiap negara miliki untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil. Istilah kepentingan nasional telah dipakai oleh ilmuwan semenjak

negara-bangsa ada. Kepentingan nasional digunakan untuk mendeskripsikan aspirasi dan tujuan dari entitas yang berdaulat pada skema internasional. Terdapat beberapa ilmuwan seperti Hans Morgenthau dan Joseph Frankel yang telah memaparkan pandangan mereka mengenai konsep kepentingan nasional.

Donald E. Nuechterlein menyatakan bahwa kepentingan nasional dimaknai sebagai kebutuhan yang harus dimiliki dan diwujudkan oleh negara yang berdaulat dalam hubungannya terhadap negara berdaulat lain yang terdiri dari lingkungan eksternal (Nuechterlein, 1976). Nuechterlein menjelaskan lebih lanjut terdapat 4 kebutuhan atau keadaan yang bisa digunakan untuk membantu mengidentifikasi kepentingan nasional, yaitu:

- 1) Kepentingan Pertahanan (*Defense*): perlindungan oleh negara kepada warga negaranya dari ancaman dari kekerasan fisik yang dilakukan secara langsung dari negara lain dan atau secara eksternal yang berpotensi mengancam sistem negara dan pemerintahan.
- 2) Kepentingan Ekonomi (*Economic*): penguatan dari kondisi perekonomian negara pada hubungannya dengan negara lain.
- 3) Kepentingan Tatanan Dunia (*World Order*): proses stabilisasi politik internasional dan sistem ekonomi dimana negara di dalamnya merasa aman dan warga negara dan pasarnya beroperasi secara damai diluar batas negaranya.
- 4) Kepentingan Ideologis (*Ideological*): perlindungan dan dorongan pada nilai tertentu yang kepercayaan dan pembagian dari masyarakat suatu negara berjalan baik secara umum.

Nuechterlein memaparkan bahwa aspek ekonomi termasuk pada salah satu *Major issues* dimana kondisi perekonomian dari suatu negara dapat terpengaruh secara

tidak menguntungkan dari peristiwa atau *trends* dalam skema internasional dan oleh karena itu membutuhkan tindak lanjut untuk memperbaikinya untuk mencegah menjadi ancaman yang lebih serius. Aspek ekonomi menjadi salah satu aspek penting negara karena keadaan ekonomi negara tidak berdiri secara sendiri melainkan juga bergantung pada sistem ekonomi internasional. Pemerintah harus menentukan langkah yang tepat terhadap penyusunan perekonomian negara karena kepentingan nasional inilah yang nantinya juga akan menentukan bagaimana arah kebijakan luar negeri.

Pada penjelasan selanjutnya Nuechterlein memaparkan bahwa meskipun aspek ekonomi rentan terhadap perubahan keadaan internasional, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan perjanjian dengan melibatkan negara lain (Nuechterlein, 1976). Adanya aspek ekonomi pada proses pembentukan kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional dapat dilihat dari fenomena penandatanganan kerja sama bilateral. Konsep kepentingan nasional pada aspek ekonomi digunakan untuk menjelaskan proses negosiasi antara Indonesia dan Korea Selatan pada Perjanjian IK-CEPA. Konsep tersebut digunakan untuk memaparkan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kebijakan Indonesia untuk menandatangani kerjasama IK-CEPA.

## **2. Konsep Negosiasi**

Menurut Alain Plantey, negosiasi adalah sebuah bentuk hubungan antara negara yang berdaulat. Negosiasi bisa menjadi pengaruh yang dilihat secara keseluruhan dari suatu permasalahan maupun yang meliputi detail penting pada permasalahan tersebut. Negosiasi bisa mencakup mulai dari perang, bisnis, ilmu pengetahuan serta perwakilan diplomatic dan perlindungan konsuler. Negosiasi juga merupakan pelaksanaan strategi dari pemimpin politik yang digunakan untuk melindungi kepentingan pribadi (Plantey, 2007). Plantey memaparkan bahwa negosiasi tidak selalu memiliki nilai dan

kepentingan yang sama. Akan ada perbedaan kepentingan yang dibawa pada proses negosiasi bergantung urgensi yang ada. Sehingga proses negosiasi akan selalu berubah dan menyesuaikan dengan apa yang ada pada waktu dan kejadian tertentu.

Selanjutnya Plantey menambahkan bahwa negosiasi telah berkembang ke tingkat yang menunjukkan bahwa negosiasi sudah menjadi aktivitas utama yang khusus bagi negara modern. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang bersifat hubungan dalam negeri serta hubungan dengan luar negeri. Plantey menyebutkan dalam bukunya:

*“As such, the practices of negotiations adapt itself, as indeed it must, to the contemporary climate of profound and irreversible upheaval.”* (Plantey, 2007, p. 315)

Sesuai pada pernyataan diatas, Plantey menegaskan lagi bahwa negosiasi yang terjadi dan melibatkan dua pihak dalam hal ini negara akan selalu mengalami perubahan dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Selain itu adanya isu atau masalah utama yang dihadapi dalam tingkat internasional yang menyebabkan terjadi ketidakstabilan pada keamanan dan keadaan nasional juga menyebabkan perubahan keputusan dalam negosiasi. Sehingga dapat dilihat bahwa perkembangan negosiasi ditentukan oleh keadaan yang berfokus pada komitmen untuk menghadapi masa depan dan inisiatif kolektif untuk menjalankan proyek bersama (Plantey, 2007).

Akibatnya, suatu perjanjian atau kerja sama akan mengalami perubahan sesuai dengan berkembang atau menyempitnya kepentingan serta berjalannya waktu. Konsep negosiasi inilah yang akan digunakan penulis untuk menganalisis keberhasilan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Korea Selatan dalam kerangka IK-CEPA yang sebelumnya sempat mengalami ketidaksepakatan.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan analisis terhadap konsep teori kepentingan nasional dan negosiasi, penulis mendapatkan hipotesis bahwa faktor yang menyebabkan Indonesia berhasil melakukan negosiasi dengan Korea Selatan pada perundingan perjanjian dagang dalam IK –CEPA adalah kedua negara memiliki kepentingan yang mirip serta terdapat perubahan keadaan yang terjadi di dua negara sehingga hipotesis yang penulis rumuskan adalah:

1. Terdapat faktor internal yaitu pada kepentingan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan yang ingin dicapai melalui perjanjian dagang IK –CEPA
2. Terdapat faktor eksternal yaitu sikap Indonesia yang lebih adaptif untuk melanjutkan perjanjian dagang IK – CEPA dengan Korea Selatan

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Metodologi**

Pada penelitian tentang Faktor Keberhasilan Negosiasi Indonesia dengan Korea Selatan Perundingan IK-CEPA dapat dilanjutkan setelah mengalami kevakuman, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi yang nyata dan faktual agar bisa membantu penulis menjelaskan fenomena yang diteliti.

##### **2. Pengumpulan dan Teknik Analisis Data**

Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Melalui data sekunder ini penulis memanfaatkan bermacam sumber literatur seperti buku, artikel internet, dokumen resmi, laporan, publikasi dan lain sebagainya. Proses analisis data dilakukan secara induktif.

## **F. Sistematika Penulisan**

- BAB I** Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Pada bab ini penulis membahas mengenai dinamika hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan.
- BAB III** Pada bab ini penulis menjelaskan tentang faktor internal penyebab keberlanjutan negosiasi Indonesia dan Korea Selatan dengan melihat dari sisi kepentingan nasional masing-masing negara.
- BAB IV** Pada bab ini penulis membahas tentang faktor eksternal yaitu sikap Indonesia yang lebih adaptif sehingga negosiasi Indonesia berhasil melanjutkan kerjasama IK-CEPA setelah mengalami masa vakum.
- BAB V** Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan berdasarkan analisis penelitian yang sudah dilakukan.